

BAB I

PENDAHULUAN

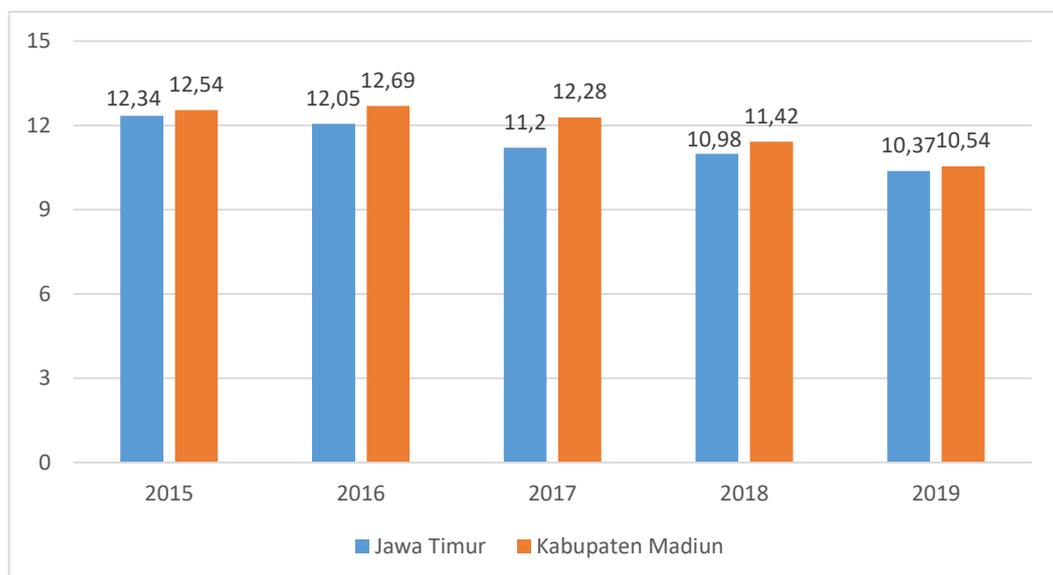
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perekonomian (Marini, 2016). Menurut Todaro dalam Wijayanti (2003), tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya juga harus dapat menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan serta tingkat pengangguran.

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar bagi setiap negara didunia khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara (Pratama, 2015). Berbagai kondisi yang mendeskripsikan masyarakat miskin seperti masih banyaknya anak-anak menderita gizi buruk, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, dan masih kurangnya akses infrastruktur maupun pelayanan publik (Tisniwati, 2012). Kemiskinan di Indonesia di sebabkan oleh berbagai aspek yaitu tingkat penghasilan yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Pateda et al., 2017).

Di Indonesia, kemiskinan adalah masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri (Pratama, 2015). Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara nasional angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena strategi pemerintah dalam memberantas kemiskinan yaitu dengan perlindungan sosial yang komperhensif, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan matapencaharian yang layak serta berkelanjutan (BPS, 2020). Untuk melihat perkembangan kemiskinan Jawa Timur dan Kabupaten Madiun dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1. 1Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020)

Berdasarkan gambar diatas kemiskinan Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan selama tahun 2015-2019, sedangkan pada Kabupaten Madiun meskipun pada tahun 2015- 2017 mengalami fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin berbanding lurus dengan target pembangunan yang telah terencana .

Kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan disebabkan oleh karakteristik pendidikan di Jawa Timur semakin membaik setiap tahun seiring dengan gencarnya berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya penduduk miskin (*BPS Jawa Timur, 2020*). Dalam hal ini yang termasuk dalam karakteristik pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan yang ditamatkan (*BPS Jawa Timur, 2020*).

Namun dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Timur masih menempati peringkat ke-3 dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan DIY (*BPS, 2020*). Keadaan tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk yang begitu begitu besar dan terus bertambah setiap tahunnya dan tidak diimbangi pemerataan persebaran penduduk (*BPS Jawa Timur, 2020*). Selama ini sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa menurut data sensus BPS pada tahun 2010 menunjukkan sebanyak 57,48% orang dari total penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dari jumlah tersebut 27,43% tinggal di Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk terbesar setelah Provinsi Jawa Barat (*Zamhari et al., 2015*). Hal ini mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga pertumbuhan ekonomi juga tidak merata (*Prawidya, 2016*).

Misalnya pada daerah Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur sehingga pembangunan banyak dipusatkan pada daerah tersebut dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih

sedikit. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan (Prawidya, 2016).

Kemiskinan di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,88% dibanding tahun 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Madiun ini menempati posisi ke 16 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2020*). Menurunnya kemiskinan di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yaitu dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita dan konsumsi masyarakat (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2020*).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran tahun 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	Pengangguran (%)
2015	5,26	1.201.750	6,99
2016	5,27	1.340.000	6,69
2017	5,42	1.450.550	3,19
2018	5,10	1.576.893	3,81
2019	5,42	1.763.268	3,62

Sumber : (BPS Jawa Timur, 2020)&(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020) data diolah

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun tahun 2019 sebesar 5,42%. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2019, hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi tanaman pangan terutama tanaman padi sejumlah 58,92% dari total jumlah produksi (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2020*). Kondisi tersebut disebabkan karena sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Madiun merupakan sektor pertanian (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2020*).

Upah minimum kabupaten di Kabupaten Madiun setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No : 188/666/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 bahwa UMK Kabupaten Madiun Tahun 2019 ditetapkan sejumlah Rp. 1.763.268 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dengan jumlah Rp. 1.576.893. Peningkatan nilai UMK di Kabupaten Madiun tersebut disebabkan oleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang juga selalu mengalami peningkatan, karena dengan pertimbangan bahwa kesejahteraan pekerja harus tetap terjamin (Merdekawaty et al., 2016).

Dilihat melalui perbandingannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Madiun dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 17 yang berarti naik empat peringkat dibanding pada tahun 2018 yang berada di urutan ke-21 (*BPS Jawa Timur*, 2020). Pengangguran di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 trennya menurun sebesar 0,18%. Penurunan pengangguran di Kabupaten Madiun tersebut disebabkan karena peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikannya dan menunda peran aktif di pasar kerja. Sedangkan angka pengangguran di Kabupaten Madiun di dominasi oleh masyarakat lulusan SMA (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun*, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah faktor penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan pada suatu negara, untuk menurunkan kemiskinan setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal (Jonaidi, 2012). Masyarakat miskin diakibatkan oleh

kekurangan dana atau tidak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Harlik et al., 2013). Dengan penerapan upah minimum maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan banyaknya pengangguran, menurut Yacoub (2012) secara teori apabila seorang individu atau masyarakat memiliki pekerjaan maka akan dapat memenuhi kebutuhannya menggunakan upah kerja yang dimiliki sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi.

Lebih lanjut penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya salah satu penelitian tentang pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Purnama, 2017), (Hambar Sari & Inggit, 2016), (Windra et al., 2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 2018), (Romi & Umiyati, 2018) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian tentang pengaruh UMK terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2020), (Yusnedi et al., 2019) menyatakan bahwa UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan et al., 2020), (Widyawati, 2017), (Suyono, 2018) menyatakan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan oleh (Bintang & Woyanti, 2018), (Prasetyoningrum, 2018), (Kurniawan, 2018)

penyatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017), (Usman & Diramita, 2018) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

Dilihat dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa faktor determinan dari kemiskinan bervariasi dan menunjukkan hasil yang masih tidak konsisten. Dengan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disini penulis melihat berdasarkan dari data yang terdapat di BPS (2020) bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi, terus naiknya nominal UMK, dan pengangguran yang mengalami tren penurunan belum dapat menjadi bukti yang akurat. Dari alasan tersebut maka masih diperlukan adanya penelitian selanjutnya yang terus menguji determinan dari kemiskinan khususnya pada perkembangan tahun yang lebih baru. Dalam penelitian ini, tingginya kemiskinan di Kabupaten Madiun menjadi masalah yang akan diteliti dimana kemiskinan di Kabupaten Madiun masih tergolong cukup tinggi yang menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dimana hal tersebut dapat menghambat target pembangunan yang telah terencana. Hal tersebut menunjukkan diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguraan. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengambil judul penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun”**

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada suatu negara dapat dilihat dari tingkat kemiskinannya (Laoh et al., 2016). Menurut World Bank dalam Harlik et al., (2013) salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Kemiskinan di Kabupaten Madiun masih tergolong cukup tinggi yaitu menempati posisi ke 16 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2020*).

Dari berbagai konsep yang telah diuraikan diatas maka muncul pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun?
2. Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun?
3. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun.

3. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode 2009-2019 pada Kabupaten Madiun
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah kemiskinan sebagai variabel dependen dan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran sebagai variabel independen

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan untuk pengambilan kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan terutama di Kabupaten Madiun serta dapat menambah wawasan dan sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang.